

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan juga harus dituntut supaya bisa bertahan serta bisa bersaing dengan perusahaan lainnya sehingga semakin ketatnya persaingan tersebut, maka perusahaan harus memiliki cara untuk sebuah pendanaan. Perusahaan manufaktur adalah salah satu perusahaan yang telah *Go Publik* terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur memiliki perputaran persediaan tinggi, sehingga sumber dana harus tersedia secara tepat dan baik dalam jumlah maupun waktu agar aktivitas operasi perusahaan tidak terganggu, perusahaan juga membutuhkan modal dari investor agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai target. Perusahaan manufaktur memiliki kinerja dan performa saham yang sangat bagus untuk menjadi prioritas investasi karena memiliki peluang yang besar. Perusahaan manufaktur lebih mudah terpengaruh oleh kondisi ekonomi, politik dan memiliki sensitifitas yang lebih tinggi terhadap setiap kejadian, baik internal maupun eksternal perusahaan. dengan alasan tersebut perusahaan harus mampu menjaga kesehatan keuangan atau likuiditasnya. Mengingat besarnya pengaruh yang timbul akibat terjadi kesulitan keuangan pada perusahaan manufaktur, maka perlu dilakukan analisis sedemikian rupa, sehingga masalah kesulitan keuangan atau kemungkinan kebangkrutan dapat di deteksi lebih awal agar selanjutnya menentukan arah kebijaksanaan.(Wahasusmiah, 2018)

Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang. Hutang merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang (*cost of debt*) merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan (Efendi, 2019).

Pendanaan perusahaan yang berasal dari sumber eksternal perusahaan lainnya yaitu pinjaman (hutang) dari kreditor. hutang membutuhkan biaya, atau disebut biaya hutang (*cost of debt*), yaitu tingkat pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditor yang berupa tingkat bunga. Hutang dipilih karena biayanya yang lebih kecil dibandingkan menerbitkan surat berharga pendanaan. Biaya hutang (*cost of debt*) sendiri adalah tingkat pengembalian yang harus dibayar perusahaan atas utangnya. Oleh karena itu, hutang harus dikelola dengan efektif dan efisien, jika tidak dapat menimbulkan kerugian bahkan menyebabkan kepailitan perusahaan (Amelia & Sitinjak, 2020).

pendanaan melalui hutang dapat menjadi alternatif dalam usaha perusahaan menyejahterakan *stakeholder*. Maksud Tujuan entitas untuk melakukan hutang adalah untuk meningkatkan nilai entitas dengan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham agar tidak terjadi penurunan harga saham, Disisi lain investor memerlukan pengungkapan yang memadai untuk menjamin apakah

investasinya memiliki imbal balik sesuai dengan apa yang diperkirakan (Anam, *et al.*, 2021).

Hutang bagaikan pisau yang memiliki dua sisi yang berlawanan, dapat bermanfaat namun dapat juga menyebabkan pihak yang terlibat merugi hingga terpaksa bangkrut. Kasus global mengenai utang terjadi pada negara-negara berkembang yang mampu mencetak predikat tercepat dan terbesar selama 50 tahun terakhir (Anggini, *et al.*, 2020). Hutang yang menimbulkan biaya hutang menjadi salah satu komponen pengurang laba. Jika tingkat hutang suatu perusahaan terlalu tinggi dan tidak ditangani dengan pengelolaan yang tepat, maka hal ini dapat menimbulkan resiko. Jika sebuah perusahaan dinilai memiliki resiko yang tinggi, kreditur akan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Kreditur melakukan ini guna mengantisipasi resiko perusahaan apabila tak mampu membayar hutangnya atau dikenal dengan istilah *default risk* (Wardani & Rumahorbo, 2018).

Biaya hutang yang menjadi salah satu komponen pengurang laba juga harus dikelola dengan baik demi mencapai kesejahteraan pemegang saham yang sebesar-besarnya (Anggini, *et al.*, 2020). hutang yang tidak dikelola dengan baik maka akan mengganggu iklim bisnis. Tata kelola yang baik dipercaya mampu menjadi mekanisme ampuh menghindari resiko dan kerugian bisnis. Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat menyebabkan perusahaan terancam merugi (Anggini, *et al.*, 2020).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, pada dasarnya antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan

terjadinya konflik keagenan. konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dengan adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh *principal* seperti *auditing*, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (*bonding expenditure*) yang dikeluarkan oleh *agent* dan kerugian residual berkaitan dengan divergensi kepentingan antara *principal* dan *agent* (Rivandi & Marlina, 2019).

Salah satu contoh perusahaan pailit karena hutang datang dari perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, yaitu PT Nyonya Meneer. PT Nyonya Meneer berawal dari pembuat jamu rumahan Lauw Ping Nio. Pada awal 1900, suami Lauw Ping Nio jatuh sakit dan ia membuat beberapa ramuan jamu untuk kesembuhan suaminya. Lalu pada 1919, Nyonya Meneer pun berdiri dan memproduksi berbagai ramuan jamu legendaris yang terkenal khasiatnya dan diekspor ke berbagai negara. PT Nyonya Meneer akhirnya dilanjutkan oleh anak dan cucu Lauw Ping Nio. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit dan pabriknya pun terpaksa harus ditutup. Produsen jamu itu digugat pailit oleh PT Nata Meridian Investara karena tercatat memiliki kredit macet sebesar Rp 89 miliar (Admin DSLA, 2021).

Beberapa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai Desember 2021 juga ada yang menerima notasi khusus terkait Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). Data terkait diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia Desember 2021 yang Menerima
Notasi Khusus Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

No	Kode Emiten	Nama Emiten	Notasi	Keterangan
1	KRAH	PT Grand Kartech Tbk	B	Adanya Permohonan Pernyataan Pailit
2	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk	B	Adanya Permohonan Pernyataan Pailit
3	MYRX	PT Hanson International Tbk	B	Adanya Permohonan Pernyataan Pailit
4	GOLL	PT Golden Plantation Tbk	B	Adanya Permohonan Pernyataan Pailit
5	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk	M	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
6	WSBP	PT Waskita Beton Precast Tbk	M	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
7	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk	M	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
8	TDPM	PT Tridomain Performance Materials Tbk	M	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sumber: (Bursa Efek Indonesia, 2021)

Dari banyaknya kasus kerugian telah menimpa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia menjadi sebuah hal yang wajar dikarenakan standar dan pelaksanaan tata kelola negara Indonesia masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui laporan pemeringkatan yang dikeluarkan oleh *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang memberikan nilai tata kelola Indonesia (*corporate governance*) yang masih pada peringkat terbawah dari negara-negara yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. Peringkat tata kelola Indonesia saat ini masih dalam kategori rendah hal ini menjadi pertanda bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar atas aspek *corporate governance* khususnya perusahaan go publik yang terdaftar di BEI. Dengan ini bertolak belakang dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang masuk 12 besar dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak agar

pelaksanaan dan kualitas sistem tata kelola terus meningkat dan kemanfaatannya bagi rakyat juga semakin besar (Anggini, *et al.*, 2020).

perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi mempunyai dampak yang besar, salah satu akibat yang ditimbulkan yaitu entitas tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Maka sebaiknya entitas membutuhkan *monitoring* kinerja dari manajemen entitas tersebut. Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah diperlukan pada suatu perusahaan. Penerapan GCG pada entitas dinilai mampu meminimalisir biaya hutang (Anam, *et al.*, 2021).

Good Corporate Governance diartikan secara singkat berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keputusan dalam entitas. Hal ini karena GCG diyakini bisa meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang akan membuat perusahaan merugi dan tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan serta tidak mengurangi transparansi informasi yang didapatkan oleh pihak eksekutif maupun *stakeholder* perusahaan (Calen, 2019).

Perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam sejak negara-negara di Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk *Enron Corporation* dan *WorldCom* di Amerika Serikat, *HIH Insurance Company Ltd* dan *One-Tell Pty Ltd* di Australia serta Parmalat di Itali pada awal dekade 2000-an. Menurut Sutojo dan Aldridge, hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama

terjadinya tragedi ekonomi atau bisnis di atas adalah karena lemahnya *Corporate Governance* di banyak perusahaan (Sari, *et all.*, 2018).

Konsep *Corporate Governance* mulai menguat di Indonesia akibat krisis yang terjadi pada akhir tahun 1997 yang ditandai dengan ditandatanganinya *Letters of Intens* (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan lembaga donor IMF yang mensyaratkan perbaikan *Corporate Governance Public* maupun korporasi (Calen, 2019). Tata kelola perusahaan yang tidak baik menyebabkan terjadi manipulasi informasi oleh perusahaan. Namun walau menyadari pentingnya *Good Corporate Governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* karena dorongan regulasi atau untuk menghindari sanksi, dibandingkan dengan menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur entitas. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *Good Corporate Governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan (Sari, *et all.*, 2018).

Kebijakan mengenai *Corporate Governance* bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan oportunistik yang mungkin terjadi. Maka dari itu mekanisme pengawasan yang memadai dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan pada umumnya telah mengarahkan perusahaan untuk menciptakan manfaat untuk stakeholder dan menghargai setiap haknya. Dapat dilihat dari prinsip umum *Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Anggini, *et all.*, 2020).

Perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang kuat ternyata memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menerapkan GCG dengan lemah. Hal ini karena peringkat kredit yang akan mempengaruhi persepsi para kreditor dan calon kreditor atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Perusahaan dengan performa baik akan dengan mudah mendapat akses dalam pendanaan utang dengan biaya rendah (Calen, 2019).

Pengukuran penerapan GCG perusahaan yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya adalah Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit. Penelitian tentang *Good Corporate Governance*, biaya hutang telah beberapa kali dilakukan, namun masih menimbulkan celah penelitian. Perbedaan hasil penelitian terdahulu akan diteliti dengan menguji hubungan apa yang dimiliki *Good Corporate Governance* terhadap biaya hutang. Untuk itu, peneliti tertarik untuk kembali menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap biaya hutang.

Faktor pertama dari *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi biaya hutang adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, asuransi dan bank. investor institusional ini biasanya bertugas sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan dan dalam melakukan *monitoring* investor institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham (Wardani & Rumahorbo, 2018).

Investor institusional melakukan *Monitoring* untuk menjamin kemakmuran pemegang saham. kepemilikan institusional yang besar dapat menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan lebih baik. Dalam pengawasan yang baik akan mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi baik dapat menjamin kemakmuran pemegang saham sehingga risiko perusahaan berkurang. Berkurangnya risiko akan mengurangi biaya hutang yang diberikan oleh kreditor (Wardani & Rumahorbo, 2018). Dengan adanya kepemilikan institusional *monitoring* terhadap pihak manajemen dapat lebih efektif sehingga dapat menyebabkan penggunaan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat *monitoring* biaya keagenan sudah diambil alih oleh investor institusional (Anam et al., 2021). Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya hutang, semakin tinggi kepemilikan Institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol terhadap perusahaan dimana dapat mengurangi *agency cost* pada perusahaan serta penggunaan hutang. (Rivandi & Marlina, 2019).

Faktor kedua dari *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi biaya hutang adalah adalah dewan komisaris. Peranan dewan komisaris diperlukan karena pemegang saham kesulitan untuk memonitor dan mengontrol manajemen perusahaan. Hal tersebut membatasi kesempatan bagi pemegang saham untuk mengeliminasi *agency cost*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan *agency problem* karena peranannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen atas nama pemegang saham. Hal ini menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan suatu mekanisme *corporate governance* (Sari, et al., 2018).

Efektivitas dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya hutang, karena untuk melakukan fungsi pengawasan dalam mengawasi efektivitas mekanisme pengawasan dewan komisaris tidak tergantung pada besar kecilnya dewan komisaris independen. Namun fungsi pengawasan pada dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan keahlian dewan komisaris dapat mempengaruhi proses akuntansi keuangan perusahaan dan berdampak pada perusahaan menikmati biaya bunga yang lebih rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dewan komisaris mampu menurunkan biaya hutang perusahaan (Sari, *et al.*, 2018).

Faktor ketiga dari *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi biaya hutang adalah dewan direksi. Dewan direksi bertugas untuk mengidentifikasi keberadaan kolusi dan dominasi direksi. Direksi sangat berpengaruh di perusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor atau memiliki tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Peningkatan ukuran dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan (Wibowo & Nugrahanti, 2017).

Dengan jumlah dewan direksi yang kecil maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan ukuran dewan direksi yang kecil maka akan lebih efektif dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan karena mudah dalam berkomunikasi, pengkoordinasian serta pembuatan keputusan yang tepat. Kegiatan operasional perusahaan yang efektif akan meningkatkan kinerja perusahaan, mengakibatkan risiko menjadi lebih kecil serta menambah kepercayaan di mata debitur dan kreditor. Sehingga debitur dan kreditor memberikan biaya ekuitas dan biaya hutang yang lebih

rendah kepada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap biaya hutang perusahaan (Wibowo & Nugrahanti, 2017).

Faktor terakhir dari *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi biaya hutang adalah komite audit. *Agency theory* memprediksi bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problem*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit pada perusahaan. Dengan membantu adanya pembentukan pengendalian internal yang baik, maka komite audit dapat memperbaiki kualitas keterbukaan. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Komite audit yang baik, akan menghasilkan kondisi internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan (Putri, 2017). Reputasi perusahaan yang baik, akan meningkatkan kepercayaan kreditur dan berpengaruh terhadap biaya hutang yang rendah. Komite audit yang semakin besar jumlahnya dalam suatu perusahaan maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan semakin berkualitas baik. Laporan keuangan yang semakin andal dapat mengurangi terjadinya ketimpangan informasi antara pihak perusahaan dengan para pengguna laporan keuangan, seperti investor dan kreditor. Investor dan kreditor tidak akan meminta tingkat pengembalian yang besar sehingga akan mengurangi biaya hutang (Wardani & Rumahorbo, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Biaya Hutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya hutang
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap biaya hutang?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap biaya hutang?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap biaya hutang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis tidak akan mengkaji terlalu dalam masalah ini agar menghindari melebarnya fokus permasalahan pada penelitian ini. Oleh sebab itu, ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh *Good Corporate Governance* yang terdiri dari variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap biaya hutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap biaya hutang
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap biaya hutang.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap biaya hutang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya mengenai *Good Corporate Governance* terhadap biaya hutang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran dampak dari dilakukannya penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- b. Memberikan pengetahuan bagi setiap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang pentingnya penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dan sehat serta dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan *control management* dalam penerapan ataupun implementasi mekanisme *corporate governance*.
- c. Dijadikan sebagai bahan informasi penelitian dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima tahapan bagian utama, yang terdiri atas lima bab utama yang saling berkaitan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian, dimana secara umum menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan paradigma penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, metodologi penelitian, operasional variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian deskriptif sampel penelitian, hasil analisis data dan uraian mengenai hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan, dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.